

Analisis Penyerapan Aspirasi Masyarakat Melalui Kegiatan Kunjungan Kerja: Studi pada Masyarakat Provinsi Sumatera Utara (SUMUT 1)

**Hendro Susanto, Niken Febrina Ernungtyas, Guntur Freddy Prisanto,
Anindita Lintangdesi Afriani**

Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Inter Studi Jakarta

hendrosukses26@gmail.com, niken@stikom.interstudi.edu, guntur@stikom.interstudi.edu,
lintangdesi@gmail.com

Abstract

The working visit or recess of the DPR RI is carried out to realize the aspirations of the right people on target to achieve political goals. This activity is also inseparable from the things considering that it follows local government policies and the DPRD to be said to be a successful activity. The purpose of this study was to analyze the aspiration absorption strategy through recess activities. This research method uses a qualitative-descriptive approach with in-depth interviews with three informants, namely members of the Indonesian Parliament and representatives of the electoral district of North Sumatra 1. The study results state that the strategy for absorbing people's aspirations is carried out through various forms of aspiration by involving community groups. The main structure of a method for capturing aspirations is through face-to-face dialogue with communities. People's aspirations were complete when they had felt the benefits directly.

Keywords: *community aspirations, political communication, recess, communication strategy*

Abstrak

Kegiatan kunjungan kerja atau reses DPR RI dilakukan dengan tujuan mewujudkan aspirasi masyarakat yang tepat sasaran guna mencapai tujuan-tujuan politik. Kegiatan ini juga tidak terlepas dari hal-hal yang harus dipertimbangkan agar tetap sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan DPRD sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhasil. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi penyerapan aspirasi melalui kegiatan reses. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan wawancara mendalam terhadap tiga informan, yaitu anggota DPR RI dan perwakilan masyarakat daerah pemilihan Sumatera Utara 1. Hasil penelitian menyatakan bahwa strategi penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan adalah melalui berbagai bentuk penjangkaran aspirasi dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat. Bentuk utama dari strategi untuk menjangkari aspirasi adalah melalui dialog tatap muka bersama masyarakat. Aspirasi masyarakat dapat dikatakan telah terwujud ketika masyarakat sudah merasakan manfaatnya secara langsung.

Kata Kunci: Aspirasi masyarakat, Komunikasi politik, Reses, Strategi komunikasi

PENDAHULUAN

Di dalam dunia politik, peran sebuah komunikasi tidak dapat terlepas dalam segala kegiatannya. Melalui komunikasi, penyampaian pesan-pesan politik dan tujuan politik akan dapat tersampaikan dengan baik sebagaimana mana mestinya. Komunikasi politik adalah suatu bidang atau disiplin menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik atau berpengaruh terhadap perilaku politik. Pengertian komunikasi politik dirumuskan sebagai suatu proses pemindahan lambang-lambang atau simbol-simbol yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok pada orang lain dengan tujuan membuka wawasan atau cara berfikir, serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku yang menjadi target politik (Pureklolon, 2016).

Tidak hanya komunikasi politik saja yang perlu dilakukan, akan tetapi sebuah strategi juga diperlukan guna dapat mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini, salah satu strategi komunikasi yang digunakan berupa kegiatan kunjungan reses yang dilakukan oleh para anggota DPR. Reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen (rakyat/pemilih) melalui kunjungan kerja secara berkala. Kegiatan ini dilakukan oleh para anggota dewan bekerja di luar gedung DPR dengan menjumpai konstituen di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Pelaksanaan tugas tersebut dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen, serta melaksanakan fungsi pengawasan dikenal dengan kunjungan kerja. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyebutkan bahwa kewajiban DPRD adalah menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Kunjungan kerja reses ini dapat dilakukan oleh anggota dewan secara perseorangan maupun secara berkelompok. Menurut (Setiawan, Alfian, & Widoyoko, 2013) terdapat beberapa model dalam penjangkauan aspirasi masyarakat, diantaranya model perorangan, melalui

partai politik, kelompok sesuai dengan komisi yang diduduki, bersama-sama dengan anggota DPRD di daerah pemilihan, dan model penjangkauan aspirasi yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan musrenbang.

Melalui kegiatan reses, para anggota dewan bisa menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di dapil sebagai bentuk perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas, serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Adapun masa reses DPR dilakukan sebanyak tiga kali dalam setahun atau dengan kata lain sebanyak 14 kali masa reses dalam periode lima tahun pada masa jabatan DPRD.

Kegiatan reses dilakukan oleh Tifatul Sembiring di dapil Sumatera Utara 1, yang terdiri atas wilayah Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kota Tebing Tinggi). Tifatul diusung oleh Partai Kesejahteraan Sosial. Sejak lima tahun ke belakang, Tifatul sudah ditugaskan di dapil yang sama sehingga memiliki strategi yang sudah dilakukan selama ini dengan melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat dalam rangka kegiatan reses, serta memberikan bantuan langsung kepada masyarakat di dapil Sumatera Utara 1.

Sebagai anggota DPR yang melaksanakan kunjungan kerja reses, Tifatul harus benar-benar melaksanakan kegiatan ini dengan efektif, penuh tanggung jawab, sehingga bisa menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggung jawaban moral dan politis kepada konstituen. Oleh karena itu, setiap anggota DPR harus memiliki strategi dalam melaksanakan kegiatan reses dan menyadari faktor-faktor yang dapat mewujudkan keberhasilan dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Utomo & Hafied Cangara, 2013) menemukan bahwa strategi komunikasi dalam penyerapan aspirasi masyarakat di

Kabupaten Teluk Bintani berbeda pada umumnya, yakni menggunakan perantara penerjemah sebagai cara agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat adat sebagai komunikan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi strategi komunikasi diantaranya, karakteristik kelompok masyarakat adat, tatanan adat, dan asal-usul anggota DPRD. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan (Hidayatullah & Pribadi, 2016), teknis kegiatan reses, meliputi waktu, tempat, sasaran, proses diskusi, transportasi, dan terutama tingkat partisipasi masyarakat sangat menentukan faktor keberhasilan reses.

Berdasarkan pemberitaan di media setempat, dikatakan bahwa Kota Medan mengalami dua masalah yang disebabkan oleh infrastruktur dan kebersihan (Fadhil, Terpopuler, Ini, Uang, & Bank, 2020). Masalah infrastruktur adalah buruknya kondisi jalan umum yang diakibatkan rendahnya pengawasan oleh Pemko Medan. Selain itu, masalah kebersihan yang dialami adalah sering terjadi banjir akibat sampah yang menumpuk sehingga menyebabkan aliran parit tersumbat. Rendahnya kepedulian masyarakat akan kebersihan, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan dan membakar sampah di tempat terbuka menjadi faktor utama masalah tersebut (Nasution, 2019).

Dengan adanya reses, maka anggota dewan dapat mengakomodir permintaan secara langsung dari masyarakat setempat. Hal ini mengingat bahwa masyarakat adalah harapan terbesar untuk anggota dewan agar tetap menjadi yang terpilih, maka dari itu, anggota dewan harus memiliki strategi yang matang dan terorganisir sehingga dapat menarik masyarakat untuk memilihnya kembali.

Strategi komunikasi politik melalui penyerapan aspirasi masyarakat serta pendekatan dengan konstituen yang dilakukan oleh Tifatul Sembiring sebagai seorang anggota DPR RI membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah strategi penyerapan aspirasi masyarakat dapil

Sumatera Utara 1 yang dilakukan Tifatul Sembiring melalui kegiatan reses?

KAJIAN LITERATUR

(Pureklolon, 2016) menerangkan bahwa strategi komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang terencana yang akan dijalankan saat ini, guna mencapai tujuan politik pada masa depan dan merealisasikan cita-cita politik (Pureklolon, 2016). Salah satunya adalah kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh para anggota DPR RI melalui reses.

Aspirasi merupakan harapan dan tujuan keberhasilan mencapai sesuatu. (Amiruddin, 2003) aspirasi mengandung dua pengertian, yakni di tingkat ide dan tingkat peran struktural. Di tingkat ide, aspirasi merupakan sejumlah gagasan verbal lapisan masyarakat sedangkan di tingkat peran dalam struktur, aspirasi adalah keterlibatan individu secara langsung dalam suatu kegiatan. Dalam hal ini, masyarakat berpeluang besar dalam menyampaikan tuntutan atau aspirasinya yang memang disediakan ruangnya oleh pemerintah daerah.

Menurut (Adianto&As'ari, 2016) aspirasi masyarakat adalah harapan dan tujuan dari masyarakat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang berkaitan dengan hajat hidup mereka, baik secara individu maupun secara kelompok. Dalam pelaksanaan kegiatan reses, masyarakat berperan penting dalam mewujudkan keberhasilan kinerja reses sebagai konteks pembangunan guna menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah dan DPRD.

Keutamaan pelaksanaan aspirasi masyarakat adalah untuk menghindari makna ganda pembangunan, yakni sebagai ajang tipu daya elit kepada masyarakat dan sebagai perwujudan demokrasi palsu karena pembangunan hanya berupa sebuah gagasan untuk kepentingan elit belaka (Zuhriansyah, 2013). Untuk menghindari hal tersebut, anggota dewan harus menerapkan strategi dalam melakukan penjangkaran aspirasi di daerah pemilihannya.

Terdapat dua macam proses penyerapan aspirasi masyarakat, yaitu

penyerapan aspirasi masyarakat oleh pemerintah dan penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD (Dwiyanto, 2003). Penyerapan aspirasi masyarakat oleh pemerintah yang diperankan oleh DPRD dapat dilakukan secara langsung (dialog tatap muka, seminar dan lokakarya, serta kegiatan kunjungan kerja) dan tidak langsung (konsultasi dengan Pemerintah Daerah). Adapun kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan DPR dengan peninjauan lapangan dan pertemuan warga lebih umum digunakan. Hasil pada kegiatan ini akan diajukan sebagai usulan program DPRD dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Proses penyerapan aspirasi masyarakat mencakup kegiatan mendengar, menerima, mencatat berbagai kebutuhan, keinginan, kepentingan, dan tuntutan dari masyarakat pada daerah pemilihan anggota DPR. Menurut Archon Fung yang dikutip (Purwoko, 2008) terdapat tiga metode untuk memahami aspirasi masyarakat, yakni menentukan luas lingkup partisipasi. Hal ini dapat dilihat melalui lima model; (1) *self selected*, masyarakat dapat sepenuhnya menyalurkan aspirasi; (2) rekrutmen terseleksi, hanya orang-orang tertentu yang memenuhi persyaratan; (3) *random selection*, pemilihan secara acak beberapa individu yang mewakili komunitas; (4) *lay stakeholders*, beberapa warga yang sukarela mau bekerja tanpa dibayar; dan (5) *professional stakeholders*, tenaga profesional yang diberi honorarium. Kedua, melihat jenis komunikasi yang terjadi antara pemerintah dengan warganya. Ketiga, melihat relevansi antara perkembangan aspirasi dengan substansi kebijakan.

(Wasistiono & Wiyoso, 2009) mengungkapkan bahwa terdapat lima hal yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan reses DPRD sebagai berikut: (1) waktu reses yang harus sesuai dengan kegiatan masyarakat; (2) tempat reses harus strategis, netral, dan sesuai anggaran kegiatan reses; (3) kelompok sasaran yang sesuai dengan tujuan reses; (4) dukungan anggaran yang cukup sesuai kebutuhan; dan (5) data dasar dapil yang mencakup kondisi

geografis, demografi, sosial ekonomi, dan prasarana.

Dengan demikian, peranan dan partisipasi masyarakat sendiri sangat diperlukan untuk membantu anggota dewan yang melaksanakan reses. (Bryant & White, 1987) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat didorong melalui (1) proyek pembangunan bagi masyarakat desa yang dirancang sederhana dan mudah dikelola oleh masyarakat; (2) organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan (3) peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan. Maka dari itu, untuk mewujudkan hal tersebut, pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh anggota DPR harus tepat sasaran.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Kualitatif adalah rangkaian kegiatan atau proses menjangkau informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Adapun metode yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif. Deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus. Ciri-ciri dari studi kasus adalah menyebar luas tetapi memusatkan diri pada suatu unit tertentu, dengan demikian memungkinkan studi ini dapat amat mendalam (Burhan, 2007).

Narasumber merupakan orang atau pihak yang mempunyai informasi atau menguasai pokok permasalahan yang mau memberikan atau membagikan informasi tersebut kepada orang atau pihak lain. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Tifatul Sembiring selaku anggota DPR RI
- b) AP selaku perwakilan masyarakat dapil Sumatera Utara 1
- c) NK selaku perwakilan masyarakat dapil Sumatera Utara 1

(Raco, 2010) menjelaskan dalam bukunya “Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter dan Keunggulannya” bahwa pemilihan narasumber tersebut didasari oleh kriteria partisipan, antara lain:

- a) Mereka yang memiliki informasi yang dibutuhkan sesuai dengan topik penelitian
- b) Mereka yang memiliki kemampuan untuk menceritakan pengalamannya dan memberikan informasi yang dibutuhkan
- c) Benar-benar terlibat dalam gejala, peristiwa atau masalah dalam arti mereka mengalami secara langsung
- d) Bersedia untuk ikut serta diwawancarai
- e) Tidak berada dibawah tekanan, tetapi penuh kerelaan dan kesadaran akan keterlibatan

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui peneliti yang menggunakan teknik wawancara kualitatif. Melalui metode ini, peneliti dapat menggali apa saja yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, akan tetapi tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian. Selain itu, hal yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan juga masa mendatang (Patilima, 2007).

Adapun data sekunder adalah data yang ditemukan oleh peneliti melalui media *online* dan melalui studi kepustakaan dengan melakukan perbandingan dengan skripsi dan tesis terlebih dahulu, buku referensi, dan berbagai data yang tersedia di internet.

Menurut Klinger dalam buku Metodologi Riset (Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial) menjelaskan bahwa “analisis berarti kategorisasi, penataan, manipulasi dan ringkasan data untuk memperoleh jawab bagi pertanyaan penelitian (Burhan, 2007). Kesimpulan pada penelitian kualitatif berupa deskripsi atau gambaran sesuatu obyek yang sebelumnya masing remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dapat berupa hubungan kausal atau

interaktif, hipotesis, atau teori (Marzuki, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan kunjungan kerja atau *reses* seorang *dapil* utamanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat (Hidayatullah & Pribadi, 2016). Hal ini dilakukan oleh TS sebagai anggota DPRD *dapil* Sumut 1 yang sudah selama lima tahun turut terlibat dalam kegiatan tersebut. Kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan oleh TS dimulai dengan penjangkaran aspirasi masyarakat setempat. Menurut TS kegiatan aspirasi masyarakat berperan penting untuk mengetahui dan menyelesaikan secara langsung permasalahan masyarakat yang berguna untuk pelaksanaan 3 fungsi pokok dewan, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan).

TS melakukan kunjungan kerja dengan keterangan sebagai berikut. Kunjungan kerja perorangan di luar masa *reses* selama 3 hari 8 kali dalam setahun, kunjungan kerja perorangan di masa *reses* DPR RI selama 9 hari berturut turut, 4-5 kali dalam setahun. Adapun TS berperan sebagai narasumber dalam dialog-dialog dengan masyarakat.

Hal-hal yang dilakukan oleh TS beserta staff-staffnya adalah sebagai berikut. Pertama, kegiatan dialog tatap muka. Kegiatan ini paling banyak dilakukan, yaitu dengan mengundang kelompok-kelompok masyarakat, seperti pemuda, majelis majelis perwiritan, masjid, mahasiswa, guru melalui staf administrasi anggota di *dapil*. Adapun dialog tatap muka juga dilakukan secara informal melalui kegiatan seperti olahraga futsal dan lomba-lomba. Kedua, melalui kegiatan seminar, seperti seminar anti narkoba, seminar menanggulangi bahaya terorisme, dsb. Ketiga, melalui konsultasi dengan pemerintah daerah dan kunjungan ke pemda atau mitra-mitra komisi. Keempat, melalui kerja sama dengan media lokal maupun nasional.

Ditinjau dari model penjangkaran aspirasi masyarakat menurut (Purwoko,

2008) bentuk kegiatan yang dilakukan oleh TS dapat dikategorikan sebagai model rekrutmen terseleksi karena hanya kelompok-kelompok tertentu yang dapat mewakili masyarakat dapil setempat yang diundang untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, masyarakat dapat sepenuhnya menyampaikan aspirasi.

Adapun jenis komunikasi yang terjadi antara TS dan masyarakat merupakan komunikasi yang timbal balik. Gagasan dan ide yang diajukan oleh masyarakat kemudian disampaikan pada rapat dengan kementerian terkait dan tenaga ahli akan memantau hasil realisasi tersebut. Hal ini ditegaskan oleh TS sebagai berikut.

“Komunikasi timbal balik antara anggota DPR dan masyarakat dilakukan pada saat rapat”

(Muhtadi, 2008) menyatakan bahwa terdapat tiga komponen yang terlibat dalam proses komunikasi politik, dalam hal ini jenis komunikasi penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilakukan TS. Ketiga komponen tersebut, meliputi komunikator, khalayak, dan saluran-saluran komunikasi politik. Pertama, komunikator merupakan TS sebagai anggota DPR dapil yang mengarahkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat hasil dari kunjungan kerjanya di dapil setempat. Khalayak merupakan wakil-wakil dari kementerian dan juga para staf ahli yang hadir dalam rapat. Adapun saluran-saluran yang digunakan adalah berupa catatan dalam bentuk matriks yang memuat ide masyarakat yang kemudian akan dipantau realisasinya oleh para staf dapil dan juga para tenaga ahli. Baik media lokal maupun media resmi partai juga berperan dalam kegiatan pemberitaan berupa rilis berita.

Kemudian relevansi kegiatan antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan juga dievaluasi. Hal ini dapat dilihat dari hasil ide dan masukan masyarakat yang sudah direalisasi. Dengan kata lain, aspirasi masyarakat dapat dikatakan telah terwujud ketika sudah diserahterimakan kepada masyarakat.

Perwakilan masyarakat dari dapil, AP dan NK menyatakan bahwa beberapa aspirasi yang mereka sampaikan berhasil diadvokasi, antara lain mobil ambulance,

lampu jalan, dan pelayanan kesehatan (BPJS) merupakan beberapa produk kebijakan yang sudah dirasakan langsung oleh masyarakat. Mereka juga turut memberikan masukan kepada TS dan staff sebagai berikut.

“Harus ada sinergisitas, dan informasi jelas ke masyarakat yang mengadakan aspirasinya. Kita yakin dengan tim support pa tifatul yang bekerja untuk membantu masyarakat yang membutuhkan”

Menurut (Wasistiono & Wiyoso, 2009) terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan reses sudah dilakukan oleh TS selaku anggota DPR RI yang bertanggung jawab di dapil Sumut 1. Berdasarkan hasil wawancara, TS telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, TS menggunakan waktu reses selama dua minggu, khususnya reses perseorangan yang dioptimalkan untuk kunjungan langsung dengan masyarakat. Waktu yang dipilih juga ditentukan sesuai dengan bentuk kegiatan, baik formal (dialog tatap muka atau seminar) dan informal (kegiatan di masjid, olahraga, atau perlombaan).

Kedua, tempat reses yang TS pilih disesuaikan dengan kelompok-kelompok masyarakat. Misalnya saat sedang menjaring aspirasi dari kelompok tokoh agama maupun majelis perwiratan, maka dilaksanakan di masjid. Jika ingin menyampaikan lebih lanjut, dapat dilakukan di rumah aspirasi dan menghubungi staff TS di sana.

Ketiga, kelompok sasaran yang dipilih oleh TS sudah mewakili seluruh lapisan masyarakat walaupun yang datang cukup dengan kelompok-kelompok masyarakat. Mereka antusias dan merasa senang dengan dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

Oleh karena itu, kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat membutuhkan kerja sama dari kedua belah pihak, yakni DPR RI beserta staff dan masyarakat setempat agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan masalah yang ingin diselesaikan.

KESIMPULAN

Penjaringan aspirasi masyarakat sebagai salah satu tujuan kegiatan kunjungan kerja atau reses DPR RI dapat terwujud dengan mempertimbangkan waktu, tempat, dan kelompok masyarakat agar tepat sasaran. Adapun komunikasi yang baik dan pro aktif masyarakat juga dibutuhkan agar aspirasi masyarakat berhasil diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adianto, Adianto; As'ari, H. (2016). PERAN DPRD DALAM MEMBANGUN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI. *PUBLIKA*, 2(1), 30–47.
- Amiruddin. (2003). *Draf tatib pilgub yang kompromistis*. Retrieved from suaramerdeka.com
- Bryant, C., & White, L. G. (1987). *Manajemen Pembangunan untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES.
- Burhan, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta, Indonesia: Putra Grafika.
- Dwiyanto, A. (2003). *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Fadhil, H., Terpopuler, B., Ini, W., Uang, G., & Bank, N. (2020). *DPRD Geram Jalan Rusak Parah di Medan Padahal APBD Besar*.
- Firmanzah. (2012). *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gaffar, A. (1992). *Javanese Voters: A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hidayatullah, H., & Pribadi, U. (2016). Analisis Jaring Aspirasi Melalui Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur Tahun 2015. *Journal of Governance and Public Policy*, 3(2), 339–367. <https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0062>
- Marzuki. (2005). *Metodologi Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial Edisi Kedua*. Yogyakarta, Indonesia: Ekosiana.
- Muhtadi, A. S. (2008). *Komunikasi Politik Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, A. (2019). *Akhyar : Tiga Masalah Klasik di Medan*.
- Patilima, H. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Pawito. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LkiS.
- Pureklolon, T. T. (2016). *Komunikasi Politik*. Jakarta, Jakarta Pusat, Indonesian: Gramedia Pustaka Utama.
- Purwoko. (2008). *Memahami Aspirasi Rakyat*. Retrieved from <http://www.bpurwoko.staff.ugm.ac.id/2008/09/25memahami-aspirasi-rakyat>
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Setiawan, B., Alfian, M., & Widoyoko, S. E. P. (2013). Model Penjaringan Aspirasi Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan Kinerja Anggota Dprd.

Sosiohumaniora, 15(2), 151.
<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v15i2.5741>

Utomo, E. P., & Hafied Cangara, M. I. S. (2013). Strategi Komunikasi Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Adat Oleh Anggota Dprd Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 2(4), 351–360.

Wasistiono, S., & Wiyoso, Y. (2009). *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Bandung: Fokusmedia.

Zuhriansyah, M. (2013). PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA DINAS CIPTA KARYA, PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal*, II(2), 311–319.